



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUDARNA
2. Jabatan : LURAH
3. NHK : 221032

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/69 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **371.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
285.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYL A G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **49.734.674**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.242.234.674**

III. HUTANG **Rp.** **350.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **892.234.674**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERA RIANA SARI
2. Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN
3. NHK : 279017

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 511.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
253.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
3. MOBIL, TOTOTA VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.142.000.000

III. HUTANG Rp. 114.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.028.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

KELURAHAN CIRACAS
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN PELAPORAN 2024
(TAHUN WAJIB LAPOR 2024)

No	Instansi	Tahun WL	Jumlah Wajib Lapor LHKPN	Sudah Lapor LHKPN		Belum Lapor LHKPN	
1	Kelurahan Ciracas	2024	7	7	100%	0	100%

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Status Laporan	Tanggal Kirim Final	Tanggal Lapor
1	Sudarna	Lurah	Kelurahan Ciracas	Sudah Lapor	07/03/2025	31/12/2024
2	Fera Riana Sari	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Ciracas	Sudah Lapor	05/03/2025	31/12/2024
3	Edy Rusmanto	Kasi Pemerintahan	Kelurahan Ciracas	Sudah Lapor	20/03/2025	31/12/2024
4	Enung Nurani	Kasi Kesra	Kelurahan Ciracas	Sudah Lapor	14/03/2025	31/12/2024
5	T Rusti V Manurung	Kasi Ekbang	Kelurahan Ciracas	Sudah Lapor	24/03/2025	31/12/2024
6	Anna Rifdayati	Pengurus Barang	Kelurahan Ciracas	Sudah Lapor	21/03/2025	31/12/2024
7	Heni Tri Rahayu	Bendahara	Kelurahan Ciracas	Sudah Lapor	03/03/2025	31/12/2024